

DETERMINAN “*FINANCIAL STATEMENT FRAUD*”: KOMITE AUDIT SEBAGAI PEMODERASI

Author:

Arum Ardianingsih¹
Wulan Ayu Sagita²

Afiliation:

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Pekalongan^{1,2}

Corresponding email

arumbundavina@gmail.com



This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Kecurangan dapat terjadi apabila perusahaan lengah dalam pengendalian dan pengawasan internal. Upaya meminimalkan dampak kecurangan melalui implementasi *corporate governance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, frekuensi rapat direksi dan gender direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, penelitian juga menganalisis komite audit dalam memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, frekuensi rapat direksi dan gender direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Metode penelitian: Pendekatan penelitian adalah kuantitatif eksplorasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder atas laporan keuangan auditan dari perusahaan property dan real estate. Total data penelitian yang digunakan adalah 100. Periode pengamatan penelitian adalah tahun 2019 sampai dengan 2023. Teknik analisis adalah model fit dan regresi logistik moderasi.

Hasil penelitian: Hasil penelitian adalah pertama, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan gender direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kedua, frekuensi rapat direksi memiliki pengaruh negative terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketiga, komite audit memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian tidak mampu mendapatkan bukti bahwa komite audit memperkuat pengaruh dewan komisaris independen dan gender direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kesimpulan: Implementasi *corporate governance* dilakukan dengan memastikan struktur dan prinsip ada dan dijalankan di perusahaan. Kontribusi penelitian adalah penggunaan teori keagenan mampu menjelaskan faktor yang meminimalkan munculnya kecurangan. Selain itu, kontribusi praktis adalah perusahaan harus lebih optimal dalam menjalin komunikasi dan koordinasi antara dewan komisaris, dewan komisaris independen, direksi dan komite audit.

Kata kunci: Dewan Komisaris, Direksi, Gender, Komite Audit, *Fraud*.

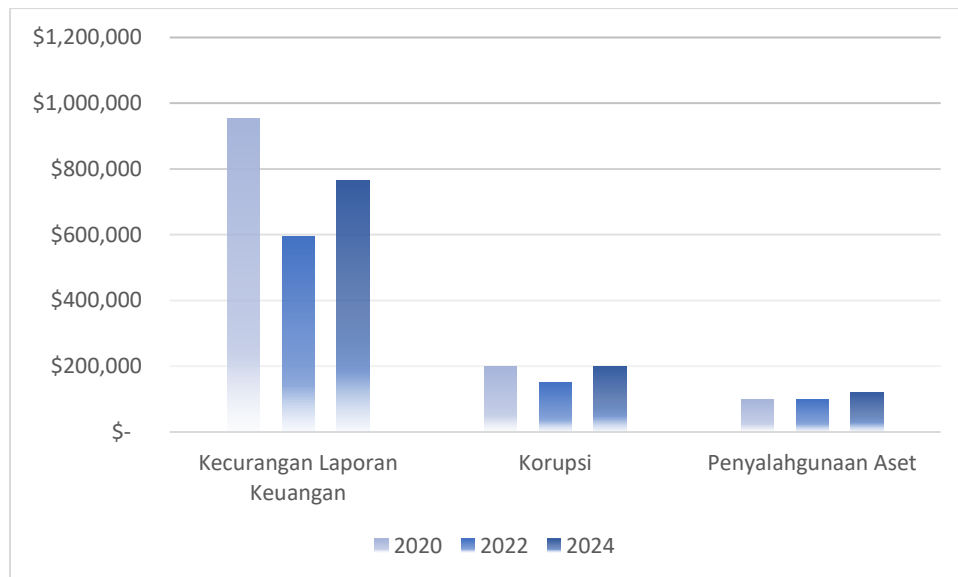
Pendahuluan

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar agar menunjukkan kinerja manajemen yang baik, sehingga menjaga kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan (Nadhim *et al.*, 2025). Laporan keuangan mengandung informasi sebagai dasar pengambilan Keputusan bisnis, jadi harus memenuhi kualitas informasi keuangan yang relevan, materialitas, berkualitas andal, dapat dipahami, jujur, netral,

disusun dengan lengkap, dan dapat dibandingkan. Namun, tidak jarang perusahaan menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang ada, karena bertujuan menciptakan persepsi yang baik dari para pengguna laporan tersebut (Biduri *et al.*, 2023). Praktik ini, tentu dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dan berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengambilan keputusan ekonomi (Muhthadin & Amin, 2023).

Berdasarkan *Report to the Nations* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), kecurangan laporan keuangan (*Financial statement fraud*) merupakan kategori kecurangan yang paling merugikan secara finansial dibandingkan dengan bentuk kecurangan lainnya. Pada tahun 2020, 2022, dan 2024, kecurangan laporan keuangan akan terus menimbulkan kerugian yang signifikan dibandingkan dengan kategori kecurangan lainnya. Kerugian akibat kecurangan laporan keuangan lebih besar daripada kerugian dalam kategori korupsi dan penyalahgunaan aset. Misalnya, pada tahun 2020, kerugian akibat kecurangan laporan keuangan mencapai \$954.000, sementara korupsi menumbang kurang dari 25% dan penyalahgunaan aset kurang dari 15% (ACFE Global, 2020). Dibawah disajikan Kerugian yang ditimbulkan akibat Kecurangan berdasarkan Survei AFCE Global (Gambar 1).

Gambar 1. Kerugian atas kecurangan.



Sumber: Data diolah tahun 2025.

Berdasarkan *Report to the Nations 2022* yang diterbitkan oleh (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2022), Indonesia menempati peringkat keempat dalam jumlah kasus kecurangan laporan keuangan di kawasan Asia Pasifik, dengan 23 kasus yang tercatat. Dalam laporan konsolidasian PT Urban Jakarta Propertindo Tbk tahun 2023, auditor independen memberikan opini wajar dengan pengecualian. Pengecualian tersebut didasarkan pada temuan bahwa perusahaan memiliki saldo piutang lain-lain sebesar Rp 558 miliar, namun tidak membuat cadangan kerugian terhadap piutang tersebut. Tindakan ini dinilai melanggar PSAK 71, yang menyatakan bahwa entitas harus membuat cadangan berdasarkan pendekatan *expected credit loss* (ECL). Dengan tidak dibentuknya cadangan kerugian tersebut, nilai aset perusahaan tercatat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, dan potensi kerugian yang mungkin timbul tidak diakui dalam laporan laba rugi. Kasus ini menunjukkan bahwa sektor properti dan real estate di Indonesia tidak luput dari praktik kecurangan laporan keuangan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Kasus selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sebuah perusahaan yang menjalankan proyek real estat di Jakarta, tidak menyajikan beberapa aset real estat secara benar dalam laporan keuangannya untuk tahun buku 2023 (Pratama, 2025).

Kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi mengindikasikan bahwa *corporate governance* yang ada tidak diterapkan secara efektif oleh perusahaan (Ismiyanti & Prastichia, 2015). Implementasi *corporate governance* oleh perusahaan akan dapat meningkatkan sistem manajemen mereka dan mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan (Kusumawardani et al., 2023). Struktur *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris, direksi, komite audit, satuan kerja audit internal (SKAI) apabila berfungsi dan berjalan baik maka diyakini akan meminimalkan terjadinya kecurangan. Hal ini telah didukung dari hasil beberapa penelitian terdahulu yaitu Kusumawardani et al., (2023) Marzuki et al., (2019), Indiraswari (2021), Probohudono et al., (2022), Kaituko et al., (2023) dan Subair et al., (2020) yang telah mengkaji ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, keberagaman gender dewan direksi (wanita), dan frekuensi rapat dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada sisi lain variabel ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan pada penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanti & Prastichia (2015) dan Ebaid (2023). Selanjutnya penelitian terdahulu juga menunjukkan variabel ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan keberagaman gender dewan direksi (wanita) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh Ebaid (2023).

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengisyaratkan adanya variabel moderasi yang mampu memperkuat pengaruh karakteristik dewan komisaris dan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian Kaituko et al., (2023), mendapatkan bukti bahwa struktur *corporate governance* yang diperkuat dengan biaya audit memberikan dampak pada kecurangan laporan keuangan. Ketika dewan komisaris dan direksi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik maka akan meminimalkan terjadinya *fraud*. Penelitian ini menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi. Hal ini karena komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan internal terhadap aspek keuangan terutama proses pelaporan keuangan. Komite audit yang berjalan secara efektif diyakini dapat memperkuat pengaruh karakteristik dewan komisaris dan kerja direksi dalam mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini melakukan kajian komprehensif mengenai dinamika kecurangan laporan keuangan pada sektor property. Industri properti memiliki transaksi jangka panjang, multi-tahap, dan melibatkan banyak estimasi seperti progres pembangunan, metode pengakuan pendapatan berbasis progres proyek. Kompleksitas ini membuat laporan keuangan memiliki area *judgment* yang memungkinkan manajemen perusahaan dapat mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda biaya berdasarkan tingkat penyelesaian proyek. Oleh karena itu, industry property sangat rawan terjadi praktik kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini, memberikan kontribusi pada faktor-faktor apa yang harus diperhatikan untuk menekan praktik kecurangan laporan keuangan.

Studi Literatur

Teori Agensi

Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan kontraktual antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), dimana manajer bertanggung jawab atas semua tugas dan kekuasaannya kepada para pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, muncul potensi konflik kepentingan karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Umumnya, agen cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya, sementara prinsipal mengharapkan peningkatan nilai perusahaan. Konflik ini dikenal sebagai konflik keagenan, yang diperburuk oleh adanya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara prinsipal dan agen (Eisenhardt, 1989). *Corporate governance* adalah salah satu cara untuk meminimalkan dampak konflik ini. Teori agensi juga menekankan perlunya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal secara efektif untuk meminimalkan dampak konflik, memberikan jaminan kepada pemegang saham bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Pengendalian atas operasional perusahaan dilakukan oleh direksi, sementara pengawasan internal dilakukan dewan

komisaris dan komite audit. Penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengurangi risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan (Rostami & Rezaei, 2022).

Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan mencakup segala macam cara dengan keahlian tertentu untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui penyampaian informasi yang tidak akurat (Ardianingsih, 2018). Kecurangan laporan keuangan adalah tindakan secara sengaja, sistematis oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kecurangan pelaporan keuangan juga diartikan sebagai tindakan menyesatkan dengan menghilangkan fakta penting secara sengaja, atau menyediakan informasi akuntansi yang dapat membingungkan, dan menyebabkan pihak pengguna laporan keuangan mengubah evaluasi mereka (Lastanti *et al.*, 2022). Menurut pendapat Biafadli *et al.*, (2023), kecurangan penyusunan laporan keuangan bertujuan mengelabui para pengguna laporan keuangan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba, aset ataupun pengakuan pendapatan sesuai tujuan yang diinginkan pelaku kecurangan. Beberapa bentuk kecurangan laporan keuangan adalah pengakuan pendapatan sebelum waktunya, mencatat penjualan fiktif, menunda pengakuan beban, mengkapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan, *overstatement aset* (mark-up nilai tanah, gedung, atau persediaan), *Understatement kewajiban* (menyembunyikan utang atau kewajiban kontinjensi) dan mengubah estimasi akuntansi secara tidak wajar.

Corporate Governance

Corporate governance adalah sebuah sistem pengawasan dan pengendalian dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan otoritas yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup perusahaan dan akuntabilitasnya kepada para pemegang saham (Cadbury, 1992). Kusmayadi *et al.*, (2019) berpendapat penerapan *corporate governance* diharapkan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. *Corporate governance* bertujuan meningkatkan produktifitas, keberhasilan dan kelangsungan bisnis yang mendukung kesejahteraan para pemegang saham, karyawan dan pihak berkepentingan lainnya, serta memberikan solusi untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Selain itu, *corporate governance* juga meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, *corporate governance* memiliki peran strategis yaitu mengurangi risiko kecurangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Penerapan *corporate governance* dilandasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, *responsibility*, dan *fairness*. Struktur (dewan komisaris, direksi, komite audit) dan mekanisme *corporate governance* memastikan implementasi *corporate governance* yang baik di perusahaan.

Ukuran Dewan Komisaris dan Kesurangan Laporan Keuangan

Dewan komisaris memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai prinsip *corporate governance*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin beragam keahlian, pengalaman, serta perspektif yang dimiliki dalam proses pengawasan. Kondisi ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas manajemen, termasuk proses pelaporan keuangan. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Komite Nasional Kebijakan Governansi 2006 mensyaratkan bahwa jumlah dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan. Dalam konteks teori keagenan maka dewan komisaris akan mengurangi peluang perilaku oportunistik agen atau manajemen perusahaan yang mengarah pada *fraud*. Ukuran dewan komisaris yang besar diyakini lebih mampu menjalankan *oversight function* secara efektif, mengurangi asimetri informasi, dan menekan peluang terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan. Penelitian dari Kaituko *et al.*, (2023) dan Subair *et al.*, (2020) memperoleh bukti empiris ukuran dewan komisaris mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hipotesis pertama penelitian ini adalah.

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dewan Komisaris Independen dan Kecurangan Laporan Keuangan

Perusahaan harus dioperasikan secara mandiri agar setiap bagian atau departemen tidak terpengaruh oleh pihak luar (Ismiyanti & Prastichia, 2015). Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 menyatakan dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan telah memenuhi persyaratan. Komisaris Independen akan memberikan tekanan kepada manajemen agar mematuhi standar akuntansi, meningkatkan kualitas proses audit, serta mempertanyakan transaksi dan kebijakan yang berisiko memicu manipulasi laporan keuangan. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Subair *et al.*, 2020). Hal ini, karena keberadaan komisaris independent memungkinkan pengawasan yang lebih tegas dan independen dalam mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi. Hipotesis penelitian berikutnya adalah.

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Gender Direksi dan Kecurangan Laporan Keuangan

Gender dalam literatur merupakan representasi kehadiran perempuan dalam direksi (Jusup & Sambuaga, 2022). Laki-laki umumnya lebih partisipatif dalam pengambilan keputusan yang memiliki tingkat risiko tinggi dibandingkan perempuan (Harris *et al.*, 2019). Sikap perempuan dalam direksi lebih cenderung ke arah konservatisme, kejujuran, dan kehati-hatian (Riguen, 2019). Oleh karena itu, ketika perempuan berada di posisi strategis sebagai pimpinan perusahaan, maka pandangan etis akan membatasi praktik kecurangan di dalam perusahaan. Dengan demikian, gender direksi meminimalkan risiko manipulasi, dan meningkatkan kemampuan direksi dalam merespon secara efektif tindakan yang tidak etis. Hipotesis ketiga yang diajukan adalah.

H3: Gender direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Frekuensi Rapat Direksi dan Kecurangan Laporan Keuangan.

Rapat direksi merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan peran pengambilan keputusan bisnis dan operasional perusahaan (Subair *et al.*, 2020). Rapat direksi yang dilaksanakan memungkinkan anggota direksi untuk mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien serta melakukan pengungkapan informasi lebih memadai kepada para pemangku kepentingan (Lipton & Lorsch, 1992). Rapat direksi menjadi forum penting untuk membahas operasional perusahaan, mengevaluasi kinerja, mendeteksi potensi risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelaporan keuangan. Frekuensi rapat menggambarkan intensitas komunikasi dan koordinasi yang kuat di dalam struktur *corporate governance*. Menurut teori agensi, Rapat direksi secara rutin mendorong transparansi dan pertukaran informasi yang lebih cepat sehingga asimetris informasi dapat diminimalkan dan penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini. Rapat direksi akan menghasilkan pelaporan keuangan secara lebih baik, karena anggota dewan akan memiliki kesempatan untuk membahas dan menyelesaikan masalah pelaporan keuangan yang mungkin timbul. Hipotesis keempat penelitian adalah.

H4: Frekuensi Rapat Direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin banyak perspektif, pengalaman, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Namun, efektivitas ukuran dewan komisaris tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, tetapi juga oleh adanya mekanisme pendukung seperti komite audit. Dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu fungsi pengawasan yang dijalankan. Dengan adanya komite audit yang berfungsi optimal, anggota dewan komisaris memiliki informasi lebih lengkap, laporan pengawasan yang lebih terstruktur, serta kapasitas analitis yang lebih tajam untuk memantau tindakan manajemen. Komite audit juga membantu menghubungkan temuan audit dengan keputusan dewan komisaris, sehingga dewan dapat lebih cepat mendeteksi dan merespons potensi manipulasi laporan keuangan. Hipotesis kelima dari penelitian adalah.

H5: Komite audit memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan

Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Komisaris independen adalah posisi ideal untuk menjalankan tugas pengawasan dalam rangka mewujudkan implementasi *corporate governance* yang baik (Dewi, 2019). Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan objektivitas pengawasan terhadap manajemen. Karena tidak terikat oleh hubungan kepemilikan, keluarga, atau keuangan dengan perusahaan, efektivitas komisaris independen dalam mencegah kecurangan laporan keuangan tidak hanya bergantung pada independensinya, tetapi juga pada mekanisme pendukung yang membantu memperdalam dan memperluas fungsi pengawasan. Salah satu mekanisme tersebut adalah komite audit. Tugas dan tanggungjawab dari Komite audit Adalah menyediakan laporan, temuan audit, dan rekomendasi yang lebih rinci, sehingga komisaris independen dapat melakukan pengawasan yang lebih tajam dan berbasis data. Dalam konteks teori keagenan, maka dewan komisaris independent dan komite audit akan menurunkan perilaku oportunistik agen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Penelitian oleh (Tamalia & Andayani, 2021), menunjukkan bahwa komite audit memperkuat dewan komisaris independen dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hipotesis keenam yang diajukan adalah.

H6: Komite audit memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.

Gender Direksi, Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Gender direksi dapat menyeimbangkan nilai dan mendorong diskusi yang kritis, dikarenakan kondisi emosional dan intelektual perempuan dan laki-laki berbeda. Semakin besar proporsi keberagaman gender, maka akan semakin kecil kemungkinan manajemen untuk terlibat dalam kecurangan laporan keuangan. Kehadiran direksi perempuan yang memiliki kecenderungan lebih berhati-hati dan berorientasi pada etika akan semakin diperkuat oleh dukungan komite audit. Teori keagenan mensyaratkan adanya mekanisme pengendalian internal untuk mengurangi kesempatan agen melakukan tindakan memperkaya diri dengan kecurangan laporan keuangan. Komite audit menyediakan struktur dan informasi yang diperlukan bagi direksi perempuan untuk mendorong transparansi, menolak agresivitas manajerial, dan memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Pada akhirnya, komite audit akan menciptakan pengawasan yang lebih kuat dan sistematis untuk meminimalkan timbulnya kecurangan laporan keuangan. Hipotesis ketujuh adalah.

H7: Komite audit memperkuat pengaruh gender direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Frekuensi Rapat Direksi, Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Frekuensi rapat direksi dalam mencegah kecurangan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah rapat yang dilakukan, tetapi juga oleh kualitas informasi dan dukungan mekanisme pengawasan yang tersedia. (Lipton & Lorsch, 1992). Dalam hal ini, komite audit memiliki peran strategis sebagai mekanisme pendukung yang dapat memperkuat hasil dari rapat direksi. Dengan adanya komite audit yang kuat, rapat direksi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi forum pengawasan yang substansial dan berbasis data. Temuan dan rekomendasi komite audit memperkaya agenda rapat direksi, sehingga potensi kecurangan laporan keuangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditangani secara lebih efektif. Perspektif teori agensi menyatakan bahwa meningkatnya frekuensi rapat direksi diharapkan dapat menurunkan peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hal ini karena pengawasan oleh komite audit yang lebih intensif mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen. Hipotesis kedelapan dari penelitian ini adalah.

H8: Komite audit memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek penelitian adalah perusahaan di sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan

purposive sampling. Penelitian ini mengambil periode pengamatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data penelitian adalah laporan tahunan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang telah diaudit. Data penelitian diperoleh melalui www.idx.co.id untuk memperoleh laporan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dan atau melalui situs web masing-masing perusahaan. Total populasi adalah 94 perusahaan di bidang properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Penelitian memiliki empat variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independent, gender direksi dan frekuensi rapat direksi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu komite audit. Operasional pengukuran masing-masing variabel disajikan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Pengukuran	Referensi
Kecurangan Laporan Keuangan	Kecurangan laporan keuangan adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, dan ini bisa merugikan orang-orang yang menggunakan laporan tersebut.	$F\text{-Score} = \text{Accrual Quality} + \text{Fiancial performance}$ F-Score dinilai menggunakan variabel <i>dummy</i> dengan ketentuan: Jika perusahaan terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan, maka diberi skor 1 (F-Score > 1,00) Jika perusahaan tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan, maka diberi skor 0 (F-Score < 1,00)	(Yadiati <i>et al.</i> , 2023)
Ukuran Dewan Komisaris	Ukuran dewan komisaris adalah mengacu pada jumlah anggota yang terdapat dalam dewan komisaris suatu perusahaan.	Jumlah anggota dewan komisaris	(Ismiyanti & Prastichia, 2015)
Dewan Komisaris Independen	Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai dewan komisaris independen.	Persentase komisaris independen di dewan komisaris	(Probohudono <i>et al.</i> , 2022)
Keberagaman Gender Dewan Direksi (wanita)	Keberagaman gender dewan direksi merepresentasikan keberadaan perempuan dalam ruang dewan direksi.	Persentase direktur perempuan di dewan direksi	(Probohudono <i>et al.</i> , 2022)
Frekuensi Rapat Dewan Direksi	Jumlah rapat dewan direksi merupakan indikator sejauh mana dewan direksi dalam memenuhi tanggungjawabnya.	Jumlah rapat yang diselenggarakan dewan direksi.	(Kaituko <i>et al.</i> , 2023)
Komite Audit	Komite audit berfungsi sebagai salah satu entitas perusahaan di bawah pengawasan dewan komisaris yang membantu dewan tersebut dalam mengawasi penyajian informasi keuangan perusahaan.	Jumlah rapat yang diselenggarakan komite audit	(Dewi Anisykurlillah, 2021)

Hasil

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan dari perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. Analisis penelitian dilakukan dengan statistic deskriptif, model fit dan regresi logistic moderasi. Berikut disajikan hasil statistik deskriptif (Tabel 2).

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistiks					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UK	100	2	8	3.82	1.258
KI	100	.3	.6	.393	.0946
GD	100	.10	1.00	.3574	.19212
FRD	100	11	25	14.24	3.885
KA	100	4	12	5.33	2.283
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa penelitian ini melibatkan 100 data yang digunakan sebagai sampel penelitian dalam periode 2019 hingga 2023. Hasil analisis statistik menunjukkan variabel ukuran dewan komisaris (UK) memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 8. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 3,82 dengan standar deviasi 1,258. Variabel dewan komisaris independen (KI) memiliki nilai minimum sebesar 0,3 dan nilai maksimum sebesar 0,6. Rata-rata nilai untuk variabel ini adalah 0,393 dengan standar deviasi 0,0946. Hasil uji statistik variabel gender direksi (GD) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,10 dan nilai maksimum sebesar 1. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 0,3574 dengan standar deviasi 0,19212. Variabel frekuensi rapat direksi (FRD) memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 14,24 dengan standar deviasi 3,885. Variabel moderasi yaitu variabel komite audit (KA) memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 12. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 5,33 dengan standar deviasi 2,283.

Hasil pengujian diperoleh nilai -2 LogL awal adalah sebesar 80,993. Sedangkan nilai -2 LogL akhir sebesar 67,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan -2 LogL sebesar 13,988. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang dihipotesiskan fit. Kemudian nilai signifikansi dari uji Hosmer and Lemeshow's goodness of fit sebesar 0,680. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa model dapat diterima. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3 dibawah ini.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	UK	-2.134	1.227	3.027	1	.082	.118
	KI	13.550	21.874	.384	1	.536	767098.991
	GD	-14.214	10.752	1.748	1	.186	.000
	FRD	-.991	.466	4.511	1	.034	.371

KA	-3.812	2.797	1.858	1	.173	.022
UK*KA	.440	.215	4.170	1	.041	1.552
KI*KA	-3.611	4.724	.584	1	.445	.027
GD*KA	2.548	2.351	1.175	1	.278	12.776
FRD*K A	.210	.096	4.787	1	.029	1.234
Constant	18.324	12.539	2.136	1	.144	90827631.189

Sumber: Data diolah 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa frekuensi rapat direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,034 < 0,05$. Komite audit mampu memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan ($0,041 < 0,05$). Selain itu, Komite audit mampu memperkuat pengaruh frekuensi rapat direksi terhadap kecurangan laporan keuangan ($0,029 < 0,05$). Sedangkan untuk variabel ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, gender direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit juga tidak mampu memperkuat pengaruh variabel dewan komisaris independen dan gender direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris (UK) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis pertama ditolak. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang menekankan peran dewan komisaris dalam mengawasi manajemen. Penambahan jumlah anggota dewan komisaris terkadang dapat menimbulkan masalah koordinasi dan komunikasi. Dewan yang terlalu besar cenderung menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan, memperpanjang proses pengambilan keputusan, serta mengurangi fokus pengawasan terhadap isu-isu krusial seperti kualitas pelaporan keuangan. Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas pengawasan sehingga ukuran dewan komisaris tidak berdampak signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti & Cheisviyanny (2023) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Kusumawardani *et al.*, (2023), menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dan penelitian Ismiyanti & Prastichia, (2015), yang memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 13,550 dan signifikansi ($0,536 > 0,05$). Hipotesis kedua ditolak. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan. Ketidakefektifan ini diduga karena keberadaan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi. Namun secara factual, komisaris independen masih memiliki kedekatan sosial, profesional, atau ekonomi dengan manajemen atau pemegang saham pengendali. Kondisi ini dapat mengurangi objektivitas dan keberanian komisaris independen dalam mengungkap atau menentang praktik manipulasi laporan keuangan. Kenyataan berikutnya adalah komisaris independen umumnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga sangat bergantung pada informasi yang disediakan oleh manajemen. Jika informasi yang diterima tidak

lengkap atau telah diseleksi, kemampuan komisaris independen untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan juga menjadi terbatas. Hasil ini konsisten dengan penelitian Kusumawardani *et al.*, (2023), Probohudono *et al.*, (2022), Guritno *et al.*, (2020), S. N. Dewi (2019), dan Ismiyanti & Prastichia, (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Gender Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis atas gender direksi diperoleh nilai signifikansi ($0,186 > 0,05$). Hipotesis ketiga ditolak. Direksi bekerja dalam sistem pengambilan keputusan bersama, sehingga karakteristik personal seperti gender sering kali tereduksi oleh dinamika kelompok, tekanan target kinerja, dan budaya organisasi. Kehadiran perempuan yang masih minoritas sering kali belum cukup kuat (Maulidi, 2023), untuk memengaruhi kebijakan atau menentang keputusan mayoritas, termasuk dalam isu pelaporan keuangan. Selain itu, kompetensi, integritas, dan pengalaman profesional lebih menentukan kualitas direksi dalam pengambilan keputusan dibandingkan perbedaan gender. Direksi dengan latar belakang akuntansi, keuangan, atau pengalaman *corporate governance* yang kuat memiliki kemampuan lebih baik dalam mencegah kecurangan laporan keuangan, terlepas dari jenis kelaminnya. Dalam kondisi tersebut, perbedaan karakteristik berdasarkan gender menjadi kurang relevan dalam memengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Penelitian terdahulu dengan hasil yang sama dilakukan oleh Florensia *et al.*, (2025), Ebaid (2023), dan Maulidi (2023).

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian atas frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (nilai signifikansi $0,034 < 0,05$). Hipotesis keempat bahwa “frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan” diterima. Direksi bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan operasional, pengambilan keputusan strategis, dan penyusunan laporan keuangan. Frekuensi rapat yang tinggi memungkinkan direksi melakukan pengambilan keputusan bisnis secara tepat. Rapat rutin juga mendorong transparansi internal, pertukaran informasi yang cepat, dan koordinasi antaranggota direksi dalam menilai risiko penyimpangan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Kaituko *et al.*, (2023), Subair *et al.*, (2020) dan Salleh & Othman, (2016) yang memperoleh bukti empiris frekuensi rapat dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Komite Audit Memperkuat Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,440 dan signifikansi ($0,041 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis bahwa “komite audit memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan” diterima. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menambah perspektif, pengalaman, dan kompetensi untuk mencegah tindakan oportunistik manajemen, termasuk manipulasi laporan keuangan. Komite audit merupakan mekanisme pengawasan yang bertugas secara khusus dalam meninjau laporan keuangan, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, dan mengawasi pelaksanaan audit internal maupun eksternal. Komite audit dapat menyediakan informasi secara lengkap, rincian temuan audit, dan rekomendasi yang jelas kepada dewan komisaris. Informasi ini memudahkan dewan komisaris untuk mengambil keputusan berbasis fakta bila ditemukan risiko kecurangan. Dukungan komite audit memungkinkan dewan komisaris memanfaatkan kapasitas kolektifnya secara optimal, sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan semakin kecil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ravianto & Sudrajat (2025), Asih *et al.*, (2024), Dewi & Anisykurlillah (2021) yang menyatakan komite audit memperlemah ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan.

Komite Audit Memperkuat Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (nilai signifikansi $0,445 > 0,05$). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menurunkan kecurangan laporan keuangan karena mereka lebih netral dan mampu menilai kebijakan manajerial secara kritis dan logis. Komite audit berfokus pada pemeriksaan teknis laporan keuangan dan pengendalian internal. Jika dewan komisaris independen sudah cukup aktif melakukan pengawasan, peran tambahan komite audit mungkin tidak menambah efektivitas pengawasan secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nurfajri & Nugrahanti (2024), Sabhrina *et al.*, (2023), dan Sentani *et al.*, (2021).

Komite Audit Memperkuat Pengaruh Gender Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan interaksi antara gender direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (nilai signifikansi $0,278 > 0,05$). Hipotesis ketujuh ditolak. Menurut teori keagenan, manajemen mungkin terdorong untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk manipulasi laporan keuangan, demi kepentingan pribadi seperti bonus, promosi, atau mempertahankan posisi. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk meminimalkan tindakan oportunistik tersebut. Komite audit memperkuat kontrol terhadap manajemen yang memiliki insentif oportunistik. Direksi perempuan diyakini dapat menurunkan risiko kecurangan laporan keuangan karena cenderung mendorong pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati dan berorientasi pada integritas. Jika anggota komite audit kurang kompeten atau tidak sepenuhnya independen, informasi, temuan, dan rekomendasi yang diberikan kepada direksi menjadi terbatas atau kurang relevan. Dalam kondisi ini, komite audit tidak menambah efektivitas pengambilan Keputusan yang dijalankan oleh direksi Perempuan dan tidak mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian serupa diperoleh Nurfajri & Nugrahanti (2024), Sabhrina *et al.*, (2023), dan Sentani *et al.*, (2021) yaitu komite audit tidak mampu memperkuat pengaruh efektifitas pengawasan dengan kecurangan laporan keuangan.

Komite Audit Memperkuat Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan (nilai koefisien regresi sebesar 0,210 dan signifikansi $0,029 < 0,05$). Artinya, komite audit memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh rapat direksi terhadap pencegahan *fraud*. Komite audit bertugas meninjau laporan keuangan, mengevaluasi pengendalian internal, memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat teknis dan berbasis risiko. Ketika komite audit bekerja efektif, ditandai dengan anggota yang kompeten, independen, dan rapat secara intens akan menghasilkan informasi lebih lengkap dan akurat. Informasi ini kemudian digunakan dalam rapat direksi untuk membuat keputusan bisnis menjadi tepat dan mengidentifikasi potensi penyimpangan.

Kesimpulan

Implementasi *corporate governance* penting bagi perusahaan agar keberlanjutan bisnis terjaga dan menghindari terjadinya *fraud*. Perusahaan perlu memastikan struktur *corporate governance* telah tersedia dan berjalan sesuai tugas dan tanggungjawab yang dimiliki. Selain itu, prinsip *corporate governance* harus dijalankan dengan baik seperti transparansi dan akuntabilitas berupa laporan keuangan terbebas dari kecurangan. Hasil pengujian penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan gender direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan struktur *corporate governance* belum mampu menekan tindakan

kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya, frekuensi rapat direksi menunjukkan pengaruh negative terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya rapat direksi secara intens dan rutin merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi untuk mendeteksi secara dini laporan keuangan yang berpotensi ada penyimpangan.

Penelitian ini juga menemukan komite audit memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi, komite audit tidak mampu memperkuat pengaruh dewan komisaris independen dan gender direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan masih adanya disfungsi koordinasi antara dewan komisaris independen, direksi dan komite audit dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan internal secara efektif

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup sampel hanya terbatas pada perusahaan sector property dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke sector industry lainnya. Kedua, penelitian ini menggunakan regresi logistik moderasi dengan nilai koefisien determinasi sebesar 23,5%. Hal ini, mengindikasikan bahwa masih terdapat variable lain diluar model penelitian yang berpotensi memengaruhi kecurangan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup sampel yaitu seluruh jenis industry dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif ataupun mixmethod untuk mendapatkan analisis secara lebih mendalam tentang kecurangan dari sumber informasi “*fraud*” secara langsung. Penelitian ini telah berhasil berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor yang dapat meminimalkan timbulnya kecurangan laporan keuangan yaitu melalui kombinasi pengendalian dan pengawasan internal secara strategis, objektif, dan sinergis. Dalam hal ini, koordinasi dan komunikasi diperlukan antara dewan komisaris, dewan komisaris independen, direksi dan komite audit.

Referensi

- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Asih, N. L. S., Rasmini, N. K., Widanaputra, A. A. G. P., & Hasibuan, H. T. (2024). Moderate of audit committee on components of the fraud hexagon theory and fraudulent financial statements. *World Journal of Advanced Research and Review*, 23(01), 943–958. <https://doi.org/https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.1.2071>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96. <https://www.acfe.com/fraud-resources/report-to-the-nations-archive>
- Biafadli, I., Hardi, & Putra, F. (2023). Deteksi Financial Statement Fraud Dengan Analisis Fraud hexagon. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 112–129. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/54/47>
- Biduri, S., Hermawan, S., Hariyanto, W., Devi, C., Ardianti, R., & Sidoarjo, M. (2023). The Role Of Company Size As A Moderating Variable Against Financial Statement Fraud: The Beneish Model Perspective. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 235–248. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1.25828>
- Cadbury. (1992). *The Financial Aspects of Corporate Governance*. Gee. <https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/cadbury.pdf>
- Dewi, K., & Anisykurlillah, I. (2021). Analysis of the Effect of Fraud Pentagon Factors on Fraudulent Financial Statement with Audit Committee as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*,

- 10(1), 39–46. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.44520>
- Dewi, S. N. (2019). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Terjadinya Fraud (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 179–188. <https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/9227/0>
- Ebaid, I. E.-S. (2023). Board characteristics and the likelihood of financial statements fraud : empirical evidence from an emerging market. *Future Business Journal*, 47(9), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00218-z>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : and Assessment Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <http://www.jstor.org/stable/258191>
- Evergrande Dituduh Manipulasi Laporan Keuangan Rp1.227 T. (2024). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240320141428-92-1076665/evergrande-dituduh-manipulasi-laporan-keuangan-rp1227-t>
- Florensia, K., Nizarudin, A., & Karmawan. (2025). Pengaruh Fraud Hexagon dan Board Gender Diversity Terhadap Fraudulent Financial Statement pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5(1), 3976–3995. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i1.2789>
- Guritno, D. P., Probowulan, D., & Maharani, A. (2020). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Variabel Corporate Governance. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 220–229. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/view/1232>
- Harris, O., Karl, J. B., & Lawrence, E. (2019). CEO compensation and earnings management : Does gender really matters ? *Journal of Business Research*, 98(February 2018), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.013>
- Ihsanti, M., & Cheisviyanny, C. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(3), 216–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jnka.v1i3.24>
- Indiraswari, S. D. (2021). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Keberagaman Gender Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 79–90. <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-KOMPENSASI-EKSEKUTIF-DAN-KEBERAGAMAN-Indiraswari/44b5c518ffea46072de1e1ad42c0e212f1b59bb6>
- Ismiyanti, F., & Prastichia, C. (2015). Mekanisme Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan. *DeReMa Jurnal Manajemen*, 10(2), 200–226. <https://ojs.uph.edu/index.php/DJM/article/view/171>
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution , Exit , and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 831–880. <http://papers.ssrn.com/abstract=93988>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://papers.ssrn.com/abstract=94043>
- Jusup, J., & Sambuaga, E. A. (2022). Direksi Terhadap Manajemen Laba Akrua The Effect Of The Existence Of Women Board Of Directors In The Board Of Directors On Accrual Earnings Management. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 67–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/jara.v16i1.2705>
- Kaituko, L. E., Githaiga, P. N., & Chelogoi, S. K. (2023). Board structure and the likelihood of financial statement fraud . Does audit fee matter ? Evidence from manufacturing firms in the East Africa community Board structure and the likelihood of financial statement fraud . Does audit fee matter ? Evidence fro. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218175>
- Kusmayadi, D., Rusdiana, D., & Badruzaman, J. (2019). *Good corporate governance* (I. Firmansyah (Ed.); Issue September 2015). LPPM Universitas Siliwangi. <https://www.researchgate.net/publication/333106273>

- Kusumawardani, M., Soediro, A., Adhitama, F., & Farhan, M. (2023). Efektivitas Corporate Governance dan Fraudulent Financial Reporting. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1301–1314. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i05.p11>
- Lipton, B. M., & Lorsch, J. W. (1992). A Modest Proposal for Improved Corporate Governance. *The Bussines Lawyer*, 48(1), 59–77. <http://www.jstor.org/stable/40687360>
- Marzuki, M. M., Haji-abdullah, N. M., Othman, R., Aswadi, E., Wahab, A., Harymawan, I., & Wahab, A. (2019). Audit Committee Characteristics, Board Diversity, And Fraudulent Financial Reporting. *Asian Academy of Management Journal*, 24(2), 143–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.21315/aamj2019.24.2.7>
- Maulidi, A. (2023). Gender board diversity and corporate fraud: empirical evidence from US companies. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 309–331. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2022-0038>
- Muhthadin, M. Al, & Amin, M. N. (2023). Hexagon Fraud In Fraudulent Financial Statement: Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2021. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 157–172. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.292>
- Nadhim, M. F., Ragil, C., & Amalia, D. (2025). Analysis of fraudulent financial report from the perspective of a fraud hexagon. *Business, Accounting, and Knowledge Journal Research Article*, 1(February), 46–61. <https://journals.unikal.ac.id/index.php/batik/article/download/338/169/780>
- Nurfajri, M., & Nugrahanti, T. P. (2024). The Effect of Diamond Fraud on Financial Statement Fraud With Beneish M-Score on Manufacturing Companies. *West Science Accounting and Finance*, 2(01), 128–139. <https://wsj.westscience-press.com/index.php/wsaf>
- Pratama, A. (2025). 44 Temuan BPK di PT. JAKPRO. <https://monitorindonesia.com/monitor-hukum/read/2025/11/616438/44-temuan-bpk-di-pt-jakpro>. Diakses 11 November 2025.
- Probohudono, A. N., Lubis, A. T., Nahartyo, E., & Arifah, S. (2022). Governance Structure and The Tendency To Do Financial Statements Fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art6>
- Ravianto, G. F., & Sudrajat. (2025). Economics and Digital Business Review Pengaruh External Pressure dan Effectiveness Monitoring dengan Moderasi Audit Committee terhadap Fraudulent Financial Statement. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 56–72. <https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2317>
- Riguen, R. (2019). Do women in board represent less corporate tax avoidance ? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(2). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate Governance and Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1009–1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>
- Sabhrina, T., Henny, D., Jakarta, U. T., & Audit, K. (2023). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Fraudulent Financial Reporting Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Non Cyclical Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Ebid : Ekonomi Bisnis Digital*, 1(2), 127–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.37365/ebid.v1i2.188>
- Salleh, S. M., & Othman, R. (2016). Board Of Director's Attributes as Deterrence to Corporate Fraud. *Procedia Economic and Finance*, 35(16), 82–91. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00012-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00012-5)
- Sentani, A., Nia, R., Mashuri, A. A. S., Nur, H., & Ermaya, L. (2021). Pengaruh Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Fraud Pentagon Theory on Fraudulent Financial Statement with Audit Committee as Moderating). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (Jakman)*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v3i1.481>
- Subair, M. L., Salman, R. T., Abolarin, A. F., Abdullahi, A. T., & Othman, A. S. (2020). board characteristics and the likelihood of financial statement fraud. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 9(1), 57–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2020.003>
- Tamalia, N., Andayani, S. (2021). Fraud Pentagon terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi. *Prosiding Senapan*, 1(1), 49-60.

Yadiati, W., Rezwiandhari, A., & Ramdany. (2023). Detecting Fraudulent Financial Reporting In State-Owned Company: Hexagon Theory Approach. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 128–147. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/5676/2394>